

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah serangkaian aktivitas atau proses yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi ini menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi, baik manusia, keuangan, maupun material. Menurut George R. Terry (dalam Sonya Liani Nasution, dkk 2023) memaparkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan adalah langkah awal yang krusial dalam manajemen. Dalam proses ini, manajer harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan penjualan produk baru harus merumuskan strategi yang tepat. Proses perencanaan mencakup analisis situasi saat ini, identifikasi peluang dan tantangan, serta penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin memasuki pasar baru, mereka harus melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen dan kompetisi yang ada. Perencanaan yang baik akan membantu organisasi untuk mengantisipasi masalah dan merumuskan solusi yang efektif.

Setelah perencanaan dilakukan, tahap berikutnya adalah pengorganisasian. Dalam tahap ini, manajer harus mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, dan alokasi sumber daya. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah proyek besar, manajer perlu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian dari proyek tersebut. Dengan demikian, setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan dapat bekerja secara sinergis. Pengorganisasian

yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif, di mana setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal.

Setelah pengorganisasian, tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, rencana yang telah disusun dan struktur yang telah dibuat mulai diimplementasikan. Pelaksanaan memerlukan kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang efektif. Manajer harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas mereka dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan meluncurkan kampanye pemasaran baru, manajer harus memimpin timnya untuk bekerja sama dalam menciptakan konten, menjalankan iklan, dan mengukur hasilnya. Pelaksanaan yang baik akan memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat terwujud dalam praktik.

Pengawasan adalah fungsi manajemen terakhir yang tidak kalah penting. Setelah pelaksanaan, manajer harus memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi. Pengawasan mencakup pengukuran hasil, perbandingan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan tidak mencapai target penjualan yang diharapkan, manajer harus menganalisis penyebabnya dan merumuskan strategi untuk memperbaiki situasi tersebut. Pengawasan yang efektif akan membantu organisasi untuk tetap berada pada jalur yang benar dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks manajemen modern, fungsi-fungsi ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, hasil dari tahap pengawasan dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk tahap perencanaan di masa mendatang. Jika manajer dapat mengidentifikasi tren atau pola dari hasil pengawasan, mereka dapat menyesuaikan rencana yang ada untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen adalah proses yang dinamis dan terus-menerus.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, penting bagi manajer untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen ini dengan baik. Keterampilan komunikasi, kepemimpinan, analisis, dan pemecahan masalah adalah beberapa contoh keterampilan yang sangat diperlukan. Manajer yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan dengan percaya diri akan lebih mampu memimpin organisasi mereka menuju kesuksesan.

Berdasarkan pendapat para ahli, fungsi manajemen bukan hanya sekadar teori, tetapi juga merupakan praktik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Drucker, P.F. (2007), manajemen adalah seni untuk membuat orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berkaitan dengan struktur dan proses, tetapi juga dengan hubungan antar individu dalam organisasi. Keterampilan interpersonal yang baik akan membantu manajer untuk membangun tim yang solid dan kolaboratif.

Selain itu, fungsi manajemen juga harus mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Menurut Kotler, P. (2011), manajemen yang baik harus memperhatikan dampak dari keputusan yang diambil terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, manajer harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian tujuan bisnis dan tanggung jawab terhadap stakeholder lainnya. Sebagai contoh, perusahaan yang berkomitmen untuk beroperasi secara berkelanjutan akan mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap keputusan yang diambil.

2.2. Implementasi Fungsi Fungsi Manajemen

2.2.1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah fungsi dasar dan awal dalam manajemen yang menjadi fondasi bagi fungsi-fungsi manajerial lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam konteks manajemen, perencanaan dapat diartikan sebagai proses menentukan tujuan

organisasi serta merumuskan strategi, kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran sangat penting karena menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ibarat sebuah peta atau kompas yang menuntun organisasi agar tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Dengan adanya perencanaan yang matang, organisasi dapat mengetahui ke arah mana mereka bergerak, apa yang ingin dicapai, serta bagaimana cara mencapainya melalui langkah-langkah strategis yang terukur.

Tanpa adanya perencanaan yang jelas, organisasi berpotensi berjalan tanpa arah, bagaikan kapal yang berlayar di lautan luas tanpa kompas. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain pemborosan sumber daya, baik tenaga, waktu, maupun biaya. Sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara efektif justru terbuang percuma karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam penggunaannya. Selain itu, ketiadaan perencanaan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil cenderung bersifat reaktif, tidak berdasarkan analisis yang matang, sehingga sering kali menimbulkan risiko dan kerugian bagi organisasi.

Lebih jauh lagi, tidak adanya perencanaan yang baik juga bisa berujung pada kegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena setiap kegiatan yang dilakukan tidak memiliki tolok ukur yang jelas, sehingga sulit untuk mengevaluasi sejauh mana progres telah dicapai. Dalam konteks ini, perencanaan tidak hanya berfungsi untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tetapi juga menjadi dasar bagi proses pengawasan dan evaluasi. Dengan perencanaan, manajer dapat membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan target yang sudah ditentukan, sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan.

Selain itu, perencanaan juga memiliki manfaat strategis bagi organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Dunia kerja dan lingkungan bisnis terus mengalami perubahan yang cepat akibat perkembangan teknologi, globalisasi, maupun perubahan kebijakan pemerintah. Dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi dapat mengantisipasi perubahan tersebut melalui penyusunan skenario alternatif atau strategi kontinjensi. Hal ini menjadikan organisasi lebih adaptif, fleksibel, dan mampu bertahan dalam kondisi yang dinamis.

Perencanaan memiliki beberapa tahapan penting. Pertama, manajer perlu mengidentifikasi dan memahami kondisi saat ini serta sumber daya yang dimiliki organisasi. Hal ini mencakup analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengetahui posisi organisasi secara internal dan eksternal. Kedua, manajer menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART).

Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang strategi dan tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses ini, manajer juga menetapkan kebijakan sebagai pedoman umum serta prosedur sebagai langkah operasional yang sistematis. Perencanaan juga harus mempertimbangkan skenario alternatif jika terjadi perubahan kondisi, sehingga organisasi siap menghadapi berbagai kemungkinan.

2.2.2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan mengelompokkan sumber daya organisasi baik manusia, keuangan, maupun material agar dapat bekerja secara terkoordinasi dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Setelah manajer menyusun rencana, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi sumber daya agar setiap bagian dari organisasi tahu

apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Secara sederhana, pengorganisasian adalah proses menyusun struktur organisasi, menetapkan pembagian kerja, menentukan tugas dan tanggung jawab setiap individu atau unit, serta menjalin hubungan koordinasi antar bagian untuk menciptakan sistem kerja yang terintegrasi.

2.2.3. Penggerakkan (*actuating*)

Penggerakkan atau *actuating* adalah salah satu dari empat fungsi utama dalam manajemen, setelah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan sebelum pengawasan (*controlling*). Fungsi ini berkaitan erat dengan pelaksanaan rencana yang telah disusun, yaitu dengan mendorong, memotivasi, dan membimbing seluruh anggota organisasi agar mau dan mampu bekerja secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana, menggerakkan dapat diartikan sebagai upaya manajer untuk mengarahkan dan memimpin sumber daya manusia agar dapat menjalankan tugasnya dengan semangat dan efisiensi tinggi. Fungsi ini menekankan pada unsur manusia dalam manajemen, karena betapapun baiknya rencana dan struktur organisasi, semuanya tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan aktif dari para pelaksana di lapangan.

2.2.4. Pengawasan(*controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini berfokus pada pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Secara umum, pengawasan dalam manajemen dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengukur kinerja aktual, membandingkannya dengan standar atau target yang telah ditentukan, serta mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, pengawasan berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar organisasi tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.

2.3. Program Pemerintah Desa

Program pemerintah desa merupakan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Program ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, program pemerintah desa bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 60% penduduk Indonesia tinggal di desa, sehingga pengembangan program pemerintah desa sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (BPS, 2021).

Dalam konteks implementasi fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah desa ombolata idanoi kecamatan gunungsitoli idanoi, program pemerintah desa diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan infrastruktur yang belum memadai. Program-program yang dilaksanakan harus berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal. Misalnya, jika desa memiliki potensi dalam sektor pertanian, maka program pemberdayaan petani dan pengembangan teknologi pertanian harus menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriyanto (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemerintah desa sangat tergantung pada sejauh mana program tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam implementasinya, program pemerintah desa juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati

(2021), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tersebut. Masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan cenderung memiliki rasa memiliki yang lebih tinggi terhadap program yang dijalankan, sehingga mereka lebih berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

2.3.1. Tujuan Dan Manfaat Program Pemerintah Desa

Tujuan utama dari program pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2021), program pemerintah desa yang terencana dengan baik dapat mengurangi angka kemiskinan hingga 30% dalam waktu lima tahun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dan implementasi yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, program pemerintah desa berfokus pada pengembangan potensi lokal yang ada. Misalnya, di banyak desa, potensi pertanian dan perikanan menjadi sektor yang diandalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan akses terhadap teknologi pertanian modern, masyarakat desa dapat meningkatkan hasil panen mereka. Contoh nyata dapat dilihat di Desa Tanjung Sari, di mana program pelatihan pertanian organik yang diadakan oleh pemerintah desa berhasil meningkatkan hasil panen padi hingga 40% dalam satu musim tanam.

Peningkatan pendidikan juga merupakan salah satu fokus utama program pemerintah desa. Dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti sekolah dan perpustakaan, serta menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, pemerintah desa dapat meningkatkan angka

partisipasi sekolah. Di Desa Ombolata, misalnya, pembangunan gedung sekolah baru dan penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik telah mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di desa ini meningkat dari 70% menjadi 85% dalam tiga tahun terakhir.

Akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik juga menjadi prioritas dalam program pemerintah desa. Dengan membangun puskesmas dan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, masyarakat desa dapat lebih mudah mendapatkan perawatan kesehatan. Di Desa Ombolata, program kesehatan yang terintegrasi dengan program kesehatan nasional telah membantu menurunkan angka stunting dari 30% menjadi 18%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah desa berkolaborasi dengan lembaga kesehatan, dampak positif dapat dirasakan oleh masyarakat.

Manfaat program pemerintah desa juga dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, pemerintah desa dapat menciptakan rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap program yang dijalankan. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan program, karena masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga dan mengembangkan hasil dari program yang telah dilaksanakan. Misalnya, di Desa Sukamaju, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Ketika masyarakat merasa terlibat, mereka lebih cenderung menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga terlihat dari peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa. Program pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan program-program pembangunan. Menurut penelitian oleh Wibowo (2020), desa yang memiliki kapasitas kelembagaan yang baik

cenderung lebih berhasil dalam melaksanakan program pemerintah desa dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki kapasitas yang memadai. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga manajerial, sehingga aparatur desa dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam konteks ini, contoh pelatihan yang diadakan di Desa Karangrejo dapat menjadi acuan. Pelatihan manajemen keuangan desa yang diadakan oleh pemerintah daerah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Masyarakat pun merasa lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa karena mereka tahu ada sistem yang baik yang mengawasi penggunaan dana tersebut.

Program pemerintah desa juga berkontribusi pada pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas dalam program ini. Di Desa Sumber Rejo, pembangunan jalan akses menuju pusat pertanian telah meningkatkan mobilitas masyarakat dan mempermudah distribusi hasil pertanian ke pasar. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani dan memperkuat perekonomian desa secara keseluruhan.

Selain itu, program pemerintah desa juga berfokus pada pengembangan usaha mikro dan kecil. Dengan memberikan akses modal dan pelatihan kewirausahaan, masyarakat desa dapat menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, di Desa Ciptamukti, program pemberdayaan ekonomi melalui pendirian koperasi berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat. Koperasi ini tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam berbisnis.

Pembangunan yang berkelanjutan juga mencakup aspek lingkungan. Program pemerintah desa yang ramah lingkungan dapat membantu menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya, di Desa Hijau Lestari, program penghijauan dan pengelolaan sampah yang baik telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan penanaman pohon dan pengelolaan limbah, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

2.4. Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Fungsi Manajemen

2.4.1. Tantangan Umum

Implementasi fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah di Desa Ombolata menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam program-program tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk Ombolata, hanya mencapai 45%. Angka ini mencerminkan bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya menyadari manfaat dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Ketidakpahaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai program-program yang ada. Misalnya, program pembangunan infrastruktur yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, sering kali tidak dipahami oleh warga. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa partisipasi mereka dalam program tersebut dapat secara langsung mempengaruhi kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif dan mendidik masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari keterlibatan mereka. Melalui penyuluhan yang berkelanjutan dan penggunaan media lokal, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan merasa terlibat dalam proses pembangunan.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen

program. Banyak petugas desa yang kurang memiliki pelatihan formal dalam manajemen, sehingga mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa 60% kepala desa di NTT merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola program pembangunan secara efektif. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara rencana yang telah disusun dan pelaksanaan di lapangan.

Sebagai contoh, suatu program peningkatan kualitas air bersih yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik karena petugas desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen proyek. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengalokasikan sumber daya, mengatur jadwal kerja, atau melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan sumber daya dan hasil yang tidak optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas desa sangat diperlukan. Dengan meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen, diharapkan program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi fungsi manajemen. Program-program yang direncanakan sering kali terhambat oleh alokasi dana yang tidak memadai. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2022) menunjukkan bahwa anggaran untuk desa di NTT mengalami defisit hingga 30% dari yang diharapkan. Hal ini menyebabkan banyak program yang harus ditunda atau bahkan dibatalkan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Sebagai ilustrasi, sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang direncanakan untuk meningkatkan pendapatan petani lokal mungkin terpaksa dibatalkan karena kekurangan dana. Ketidakpastian ini tidak hanya mempengaruhi program tersebut, tetapi juga menciptakan rasa pesimis di kalangan masyarakat tentang kemampuan pemerintah desa dalam

memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang lebih baik dalam perencanaan anggaran, termasuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan lembaga swasta atau organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dapat tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Aspek komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak informasi mengenai program pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat dengan baik. Menurut penelitian oleh Rahman (2020), hanya 40% masyarakat yang mengetahui tentang program-program yang ada di desa mereka. Komunikasi yang buruk ini menyebabkan ketidakpahaman dan skeptisisme di kalangan warga, yang pada gilirannya menghambat partisipasi mereka.

Misalnya, jika pemerintah desa tidak menjelaskan dengan jelas tujuan dan manfaat dari program-program pembangunan, masyarakat mungkin merasa program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun saluran komunikasi yang lebih efektif, seperti forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, penggunaan media sosial, dan penyuluhan langsung. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang program-program yang ada.

Terakhir, perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi dapat mengganggu konsistensi program yang telah direncanakan. Ketidakpastian ini menciptakan kebingungan di kalangan petugas desa dan masyarakat. Menurut Supriyadi (2021), perubahan kebijakan yang mendadak dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan program hingga 6 bulan, yang jelas berdampak negatif pada hasil yang diharapkan. Ketidakstabilan ini tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah.

2.4.2. Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi fungsi manajemen, diperlukan strategi yang komprehensif dan terencana. Dalam konteks ini, kita perlu melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek yang dapat mendukung keberhasilan program-program pemerintah di tingkat desa. Salah satu langkah awal yang krusial adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam program pemerintah. Hal ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran akan dampak positif dari keterlibatan mereka.

Penyuluhan dan sosialisasi secara berkala merupakan metode yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Melibatkan tokoh masyarakat atau pemuda setempat dalam program-program edukasi dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi informasi yang disampaikan. Misalnya, di sebuah desa di Jawa Tengah, penyuluhan yang dilakukan oleh pemuda setempat berhasil menarik perhatian warga, sehingga mereka lebih aktif berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Penelitian oleh Putri (2023) menunjukkan bahwa desa yang mengadakan sosialisasi rutin mengalami peningkatan partisipasi masyarakat hingga 25%. Ini adalah bukti konkret bahwa keterlibatan lokal dalam penyuluhan dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap program pemerintah.

Selanjutnya, pelatihan bagi sumber daya manusia di tingkat desa harus menjadi prioritas utama. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan adalah kunci untuk mengimplementasikan program-program dengan efektif. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan manajemen bagi petugas desa. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Hasil penelitian oleh Wibowo (2022) menunjukkan bahwa desa yang mengimplementasikan program pelatihan untuk perangkat desa mengalami peningkatan efektivitas program sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa

peningkatan kompetensi SDM dapat berdampak langsung pada keberhasilan program, menciptakan sinergi antara pengetahuan dan praktik.

Pentingnya pengelolaan anggaran yang baik dalam manajemen desa tidak dapat dipandang sebelah mata. Anggaran merupakan instrumen utama dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, strategi manajemen desa yang efektif harus menempatkan pengelolaan anggaran sebagai fokus utama, karena keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dan digunakan.

Pemerintah desa perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan transparan. Realistis berarti bahwa anggaran disusun berdasarkan potensi penerimaan yang benar-benar dapat dicapai, bukan sekadar asumsi atau perkiraan tanpa dasar. Transparan berarti setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat luas, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau potensi penyalahgunaan dana. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik bukan hanya sekadar administrasi keuangan, melainkan juga bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan anggaran desa adalah pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari program-program desa harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan. Proses ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap program desa, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk mendukung dan menjaga keberlanjutan program yang telah disepakati bersama. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan semata berdasarkan kepentingan elite atau kelompok tertentu.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran memberikan dua manfaat besar. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat turut mengawasi bagaimana dana desa digunakan. Kedua, menghasilkan masukan yang lebih berharga, sebab warga desa biasanya lebih mengetahui kondisi riil di lapangan, seperti kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, atau pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyusun anggaran yang tepat sasaran.

Data dari **Kementerian Keuangan (2023)** menunjukkan bahwa desa-desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan anggaran berhasil menurunkan tingkat defisit anggaran hingga 20%. Fakta ini menjadi indikator nyata bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi desa, tetapi juga berkontribusi langsung pada efisiensi penggunaan anggaran. Dengan adanya partisipasi, potensi terjadinya tumpang tindih program dapat diminimalisir, sehingga dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan **keberlanjutan program desa**. Program yang disusun berdasarkan aspirasi warga akan lebih mudah diterima dan dijalankan, karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan program yang disusun secara top-down tanpa melibatkan masyarakat, yang sering kali hanya berjalan sementara dan tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan desa

Selain itu, strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai program-program pemerintah secara lebih luas dan cepat. Dalam era digital saat ini,

masyarakat semakin bergantung pada teknologi untuk mendapatkan informasi. Penelitian oleh Hidayah (2021) menunjukkan bahwa desa yang aktif menggunakan media sosial untuk komunikasi dengan warga mengalami peningkatan partisipasi masyarakat hingga 35%. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, sehingga program-program pemerintah dapat lebih dikenal dan diterima dengan baik.

Akhirnya, untuk mengatasi ketidakpastian akibat perubahan kebijakan, pemerintah desa perlu membangun fleksibilitas dalam perencanaan program. Fleksibilitas ini penting agar desa dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang mungkin terjadi, baik itu perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun dinamika yang terjadi di masyarakat. Dengan menyusun rencana cadangan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, desa dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Penelitian oleh Lestari (2022) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan pendekatan adaptif dalam perencanaan program mampu bertahan lebih baik dalam menghadapi perubahan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk keberlanjutan program-program yang dijalankan.

2.4.3. Peran Teknologi Dalam Manajemen

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah desa. Dalam konteks ini, salah satu bentuk teknologi yang dapat diterapkan adalah sistem informasi manajemen desa (SIMDes). SIMDes bukan hanya sekadar alat, tetapi merupakan sebuah platform yang memungkinkan pengelolaan data dan informasi terkait program-program pemerintah dilakukan dengan lebih efisien dan terintegrasi. Dengan adanya SIMDes, proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dapat dilakukan secara sistematis, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya

kesalahan. Data dari Kementerian Desa (2022) menunjukkan bahwa desa yang telah mengimplementasikan SIMDes mengalami peningkatan akurasi data hingga 40%. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kualitas data, tetapi juga berpengaruh positif pada pengambilan keputusan. Misalnya, dengan data yang lebih akurat, pemerintah desa dapat merencanakan program yang lebih tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Lebih jauh lagi, penggunaan aplikasi mobile juga dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Aplikasi yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan atau melaporkan masalah yang ada di desa dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam era digital ini, di mana hampir setiap orang memiliki akses ke smartphone, aplikasi mobile menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani komunikasi. Penelitian oleh Santoso (2023) menunjukkan bahwa desa yang menggunakan aplikasi mobile untuk komunikasi dengan warga mengalami peningkatan partisipasi dalam program pembangunan hingga 30%. Misalnya, sebuah desa di Jawa Tengah yang mengembangkan aplikasi mobile untuk pelaporan masalah infrastruktur, seperti jalan rusak atau penerangan jalan yang tidak berfungsi, dapat mengumpulkan lebih banyak laporan dari warga. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan masalah yang ada, tetapi juga memungkinkan pemerintah desa untuk merespons dengan lebih cepat dan tepat.

Teknologi juga berperan penting dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, platform pembelajaran daring menjadi sangat relevan. Dengan memanfaatkan teknologi, petugas desa dapat mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Ini sangat membantu terutama bagi petugas yang memiliki jadwal kerja yang padat. Data dari Asosiasi Pendidikan Daring Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 70% peserta pelatihan daring merasa lebih siap dalam melaksanakan tugas

mereka setelah mengikuti program tersebut. Contohnya, seorang kepala desa yang mengikuti pelatihan daring tentang manajemen keuangan desa dapat langsung menerapkan ilmu yang didapat dalam pengelolaan anggaran desa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mendukung peningkatan kompetensi SDM, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.

Selanjutnya, teknologi dapat digunakan untuk pengelolaan anggaran desa dengan lebih efisien. Dengan menggunakan software akuntansi, pemerintah desa dapat melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel. Dalam banyak kasus, pengelolaan anggaran yang baik merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian oleh Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa desa yang menggunakan software akuntansi mengalami pengurangan kesalahan dalam laporan keuangan hingga 50%. Misalnya, sebuah desa di Sumatra yang mengimplementasikan software akuntansi dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang sebelumnya sering terjadi, sehingga laporan keuangan mereka menjadi lebih akurat. Dengan laporan yang jelas dan transparan, masyarakat pun lebih percaya dan terlibat dalam proses pengelolaan anggaran desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam program-program desa.

Akhirnya, teknologi juga dapat mendukung monitoring dan evaluasi program secara real-time. Dengan menggunakan alat pemantauan berbasis teknologi, pemerintah desa dapat mengawasi pelaksanaan program secara lebih efektif dan cepat. Monitoring yang baik memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program lebih awal, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Hasil penelitian oleh Rachmawati (2023) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi mampu mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program lebih awal. Sebagai contoh, sebuah

desa yang menerapkan aplikasi pemantauan berbasis GPS untuk proyek pembangunan infrastruktur dapat dengan cepat mengetahui jika proyek tersebut mengalami keterlambatan atau penyimpangan dari rencana awal. Dengan informasi yang cepat dan akurat, pemerintah desa dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

Dalam kesimpulannya, teknologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan efektivitas fungsi manajemen dalam pelaksanaan program pemerintah desa. Dari sistem informasi manajemen desa yang meningkatkan akurasi data, aplikasi mobile yang memperkuat partisipasi masyarakat, platform pembelajaran daring yang meningkatkan kapasitas SDM, software akuntansi yang memperbaiki pengelolaan anggaran, hingga alat pemantauan berbasis teknologi yang mendukung evaluasi program, semua ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan transparansi pemerintah desa. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, diharapkan pemerintah desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjalankan program-program yang lebih efektif dan efisien.

2.5. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut ini :

Tabel.2.1

No	Nama peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

1	Ika Niswatin Budiarti(2022)	Implementasi Fungsi Manajerial pada Pengelolaan BUMDes di Desa Tengkapak (BUMDes Jaya Makmur)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi manajerial pada pengelolaan BUMDesa Tengkapak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian fungsi manajerial di BUMDesa Tengkapak tidak berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pengendalian dan pengarahan dalam menjalankan roda organisasi. Faktor penghambat utama adalah komunikasi yang buruk antar pengurus dan independensi masing-masing anggota dalam menjalankan lembaga, yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
2	Gabriela Ribka Benjamin, Johannis Kaawoan, Agustinus Pati(2017)	Implementasi Manajemen Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Sea,	Penelitian ini mengkaji implementasi fungsi-fungsi manajemen pemerintahan di

		Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa	Desa Sea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melaksanakan musyawarah bersama masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masih terdapat kekurangan dalam transparansi dan komunikasi. Beberapa kebijakan pembangunan tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat, yang menyebabkan kebingungan dan kurangnya partisipasi dalam proses pembangunan desa.
3	Wahyu Saputro, Razaki Persada, dan Mani Festati Broto(2023)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna	Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, dengan menggunakan model Donald P. Warwick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup baik namun belum optimal. Faktor-faktor seperti

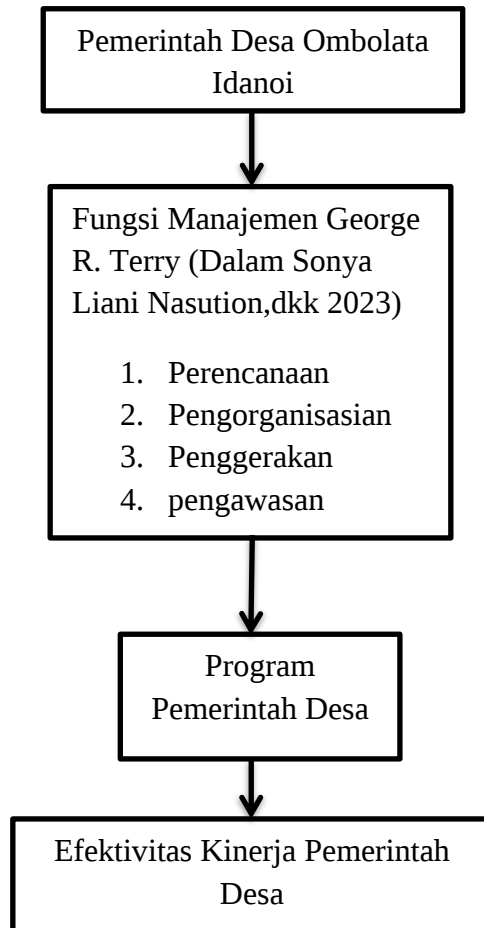
			komitmen organisasi, kemampuan organisasi, mutu informasi, dan potensi sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Hambatan yang diidentifikasi meliputi rendahnya kemampuan SDM, kurangnya SOP yang jelas, dan perubahan kepemimpinan yang mempengaruhi konsistensi kebijakan.
--	--	--	---

Sumber : olahan peneliti(2025)

2.6. Kerangka Berpikir

Dalam memudahkan peneliti melaksanakan penelitian, Maka peneliti merumuskan sebuah kerangka berpikir untuk menerangkan alur pikiran dalam penelitian . Berdasarkan rumusan kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, Dalam meningkat kan efektivitas kinerja pemerintah desa ombolata idanoi,perlu adanya implementasi yang fungsi manajemen yang baik agar semua program pemerintah desa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2.1



Sumber : Olahan peneliti 2025